

**ANALISIS PENERIMAAN SEKTOR PERHUBUNGAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN WAY KANAN
(2006 – 2010)**

(Skripsi)

Oleh
RULLY AGUSTIANTO



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

ANALISIS PENERIMAAN SEKTOR PERHUBUNGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN WAY KANAN 2006-2010

**Oleh
Rully agustianto**

Pembangunan ekonomi di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang membutuhkan pembiayaan dapat dilakukan dengan menggali seluruh potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah. Dari berbagai sumber penerimaan daerah, salah satu diantaranya diperoleh dari pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi. Dalam pembiayaan pembangunan daerah, pemerintah Kabupaten Way Kanan melakukan berbagai upaya untuk menggali berbagai potensi dana yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah (PD) . Salah satu sumber Penerimaan Daerah Kabupaten Way Kanan dapat di peroleh dari sektor perhubungan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimanakah peranan sektor perhubungan yang diukur dari, seberapa besar perkembangan sumbangan sektor perhubungan pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Way Kanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan sektor perhubungan yang diukur dari besarnya perkembangan setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan terhadap Penerimaan dari sektor perhubungan, untuk mengetahui besarnya rata-rata sumbangan sektor perhubungan pada Pendapatan Daerah di Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui batas toleransi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

ABSTRACT

ACCEPTANCE OF TRANSPORTATION SECTOR ANALYSIS OF REVENUE IN THE DISTRICT WAY KANAN 2006-2010

**By
Rully agustianto**

Economic development in the Province / Regency / City that require financing can be done to explore all the potential resources available in each region. From the various sources of regional income, one of them obtained from local income such as taxes and levies. In the district of development financing, government of Way Kanan district do many efforts to explore the potential funding that could increase regional income (PD). One source of regional income of Way Kanan Regency can be obtained from the transport sector. The problem in this research is How is the role of the transport sector as measured from, how big the development of the transportation sector's contribution to the Regional Income in Way Kanan Regency. The purpose of this study was to determine the role of the transport sector as measured by the magnitude of the development of each Technical Implementation Unit (UPTD) at the Department of Transportation on the regional income of the transport sector, to know the average contribution of the transport sector on Regional Income in Way Kanan regency and to know Actual tolerance limits regional income of Way Kanan Regency.

**ANALISIS PENERIMAAN SEKTOR PERHUBUNGAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN WAY KANAN
(2006 – 2010)**

Oleh
RULLY AGUSTIANTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN SEKTOR
PERHUBUNGAN TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH DI
KABUPATEN WAY KANAN
(2006 - 2010)**

Nama Mahasiswa : **Rully Agustianto**

Nomor Pokok Mahasiswa : **0641021073**

Program Studi : **Ekonomi Pembangunan**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

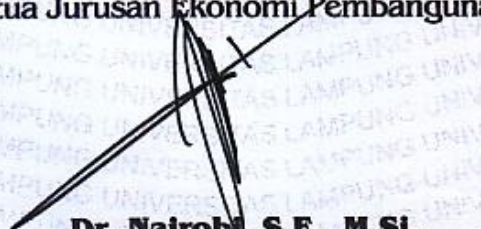
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



M.A. Irsan Dalimunthe, S.E., M.Si.
NIP 19521201 198303 1 001

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



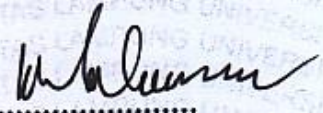
Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

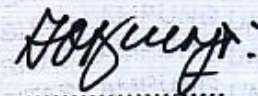
Ketua

: M.A. Irsan Dalimunthe, S.E., M.Si.



Penguji Utama

: Yurni Admaja, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Oktober 2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISM

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh:sungguh dan tidak merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai peraturan yang berlaku ".

Bandar Lampung, November, 2015

Penulis,



Rully Agustianto



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palembang , pada tanggal 13 Agustus 1988, putera ketiga dari empat bersaudara pasangan berbahagia Ayah Kamal Effendi dan Ibu Siti akbari.

Pendidikan yang penulis tempuh yaitu Pendidikan Sekolah Dasar pada SDN 26 Baturaja Sum-Sel. diselesaikan pada tahun 2000, selanjutnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada SLTPN 02 Baturaja Sum-Sel diselesaikan pada tahun 2003, selanjutnya Sekolah Menengah Atas pada SMAN 03 Baturaja Sum-sel pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 penulis diterima sebagai mahasiswa pada program studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung.

MOTTO

‘Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari ALLAH SWT. Dan aku percaya dia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang telah ia tetapkan ‘

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kepada Allah SWT, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi:

1. Ayah Kamal Effendi dan ibu Siti Akbari yang tak henti-hentinya memberikan do'a, dukungan, semangat, inspirasi, kasih sayang serta nasehat untukku dan selalu dengan sabar menunggu serta turut serta dalam keberhasilanku, terima kasih untuk semua itu. Kakak dan Adik ku, Welly Saputra, Else Eliska juliana yang telah menjadi motivasiku untuk meyelesaikan studiku.
2. Untuk seluruh keluarga besarku atas perhatian dan dorongan moril yang telah diberikan.
3. Sahabat-sahabatku yang tak dapat kusebutkan satu persatu, yang telah membantu dan selalu memberi semangat serta motivasi untuk terus melangkah menjadi lebih baik.
4. Almamater tercinta Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.dengan judul “**ANALISIS PENERIMAAN SEKTOR PERHUBUNGAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN WAY KANAN (2006 – 2010)**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung.Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Muhammad Husaini, S.E., M.EP selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Irsan Dalimunthe,S.E,M.Si selaku Dosen Pembimbing atas kesediannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Yurni Admaja, S.E, M.Si., selaku Dosen Penguji pada ujian skripsi. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada seminar proposal terdahulu.
5. Ibu Emi MaimunahS.E., M.P. selaku Pembimbing Akademik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung;
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung;

8. Ayah Kamal Effendi dan Ibu Siti Akbari tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya melalui doa yang senantiasa diberikan.
9. Kakak dan Adikku tercinta Welly Saputra, Else Erika Juliana dan Fifit Natalia terimakasih atas semua keceriaan dan dukungan yang memberiku semangat.
10. Rekan-rekan EP 06 dan sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Bandar Lampung, Oktober 2015
Penulis

Rully Agustianto

DAFTAR ISI

	Halaman
SANWACANA	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penulisan	12
1.4 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Otonomi dan Pemerintahan Daerah	15
2.2 Keuangan Daerah	18
2.3 Pengertian dan Peranan Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah .	21
2.4 Pengertian dan Peranan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah	22

2.5 Pengertian dan Peranan Dana Bagi Hasil Provinsi Terhadap Penerimaan Daerah.....	24
2.6 Peranan Sektor Perhubungan terhadap Penenerimaan Daerah Kabupaten Way Kanan	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis dan Sumber Data	26
3.2 Alat Analisis	27
3.3 Gambaran Umum	29
IV. PERHITUNGAN dan PEMBAHASAN	32
4.1 Perhitungan.....	32
4.2 Pembahasan	41
V. SIMPULAN dan SARAN	45
5.1 Simpulan.....	45
5.2 Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan tahun 2006 -2010. (DalamRupiah)	5
Tabel 2. Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan Tahun. 2006 -2010 (dalam Rupiah)	6
Tabel 3. Sumbangan PAD Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 -2010 (dalam Rupiah).....	8
Tabel 4. Sumbangan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 -2010. (Rp.)	9
Tabel 5. Sumbangan Retribusi Pengujian Kenderan Bermotor Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 -2010 (Dalam Rupiah).....	9

Tabel 6. Sumbangan Retribusi Izin Trayek Angkutan Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 -2010 (Dalam Rupiah).....	10
Tabel 7. Sumbangan Retribusi Terminal Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006-2010 (Dalam Rupiah).....	10
Tabel 8. Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan dari Setiap UPTD tahun 2006 -2010.(rupiah)	33
Tabel. 9 Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Way Kanan Dari Sektor Perhubungan Tahun 2006 – 2010.(dalam juta rupiah)	35
Tabel. 10. Kontribusi Sektor Perhubungan Terhadap Pendapatan Darerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 – 2010.(dalam rupiah).....	37
Tabel. 11 Proyeksi dan Realisasi Penerimaan dari Sektor Perhubungan yang Disumbangkan kepada Penerimaan Daerah Kabupaten Way Kanan. (jutaan Rp).....	38
Tabel. 12. Persentase Penyimpangan Realisasi dari Target Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 – 2010 (juta rupiah).....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. GrafikTarget dan Realisasi Dari Penerimaan Sektor Perhubungan Terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 - 2010	36

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai pembangunan integral dari pembangunan nasional, senantiasa harus terukur dan dapat dievaluasi. Oleh sebab itu pembangunan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus terencana dengan baik dan bersifat komprehensif. Pembiayaan pembangunan daerah di era otonomi daerah peranan pemerintah pusat masih tetap tidak bisa dilepaskan, khususnya dalam hal pembiayaan yang berupa Dana Perimbangan, akan tetapi daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber penerimaan dari potensi daerah yang tersedia.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan tugasnya selain memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah melakukan pembenahan dan melakukan pembangunan di semua sektor ekonominya. Khususnya pembangunan disektor perhubungan menjadi prioritas pembangunan daerah. Ini dikarenakan beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan yaitu;

1. Kabupaten Way Kanan menjadi daerah lintasan antar Kabupaten dan Provinsi dengan letak geografis dilalui oleh lintasan jalan raya dan kereta api.
2. Perkembangan dan perluasan pembangunan daerah berdampak pada perluasan dan pembangunan sektor perhubungan, baik perluasan ibukota kabupaten

maupun perluasan dan perbaikan jalan sampai ke desa-desa sebagai daerah kantong produksi.

3. Selain aspek pengembangan prasarana perhubungan, telah terjadi perkembangan secara alami pada sarana perhubungan, sebagai akibat kemajuan ekonomi daerah telah mendorong bertambahnya jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat termasuk jumlah angkutan umum, truk, bus dan kendaraan pribadi.

Untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pemerintah Kabupaten Way Kanan, tugas tanggung jawab dan wewenang dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana semakin ditingkatkan, dalam hal mengatur perhubungan di wilayah Kabupaten Way Kanan, yang diperkokoh oleh surat keputusan Bupati Way Kanan Nomor : 22 Tahun 2005.

Untuk mewujudkan pelayanan yang baik dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyusunan penetapan jaringan transportasi jalan ibu kota Kabupaten hingga kedesa-desa.
2. Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi terminal Bus dan terminal angkutan orang dan angkutan barang.
3. Pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan kendaraan bermotor serta penetapan izin pembangunan dan pengoperasian tempat parkir serta penetapan tarif parkir.

4. Melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor melalui penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor dan administrasi kendaraan bermotor.
5. Penetapan jaringan trayek dan komposisi angkutan ekonomi dan non ekonomi serta memberi izin pengoperasian angkutan pedesaan.
6. Memberikan izin dan pengujian alat telekomunikasi dan pemasangan alat komunikasi,serta penarikan retribusi berupa pemasangan antena penerimaan siaran radio, televisi dan sambungan saluran telepon seluler
7. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai pembantu dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun UPTD yang ada di Dinas Perhubungan :
 - 1.UPTD Parkir
 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 3. UPTD Terminal
 4. UPTD SIM dan STNK,BPKB dan PKB

Satuan Kerja Pelaksana Dinas (SKPD) Perhubungan selain menata sistim pelayanan pada masyarakat, khususnya pelayanan bidang perhubungan, SKPD ini berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan. Untuk itu dengan diberikannya hak otonomi kepada daerah, maka baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota diharapkan mampu untuk terus menggali potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan daerah.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 79, menyatakan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :
 - a. hasil pajak daerah :
 - Pajak hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
 - Pajak Parkir
 - b. hasil retribusi daerah :
 - Retribusi jasa umum
 - Retribusi jasa usaha
 - Retribusi perizinan tertentu
 - c. hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Dana Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan daerah yang sah (*Abdul halim, 2001:110*)

Kajian tentang Pendapatan daerah dapat didekati dengan memahami pengertian dari (PAD). Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi PAD Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 2006 – 2010 dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan dari tahun 2006 -2010 terus meningkat setiap tahunnya. Total Penerimaan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 mencapai Rp 34.483.155.593,21. Sumbangan terbesar diperoleh dari pos pajak daerah, dimana penerimaan terbesar pada tahun 2010 mencapai Rp. 21.317.471.037,54 dari total PAD.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan tahun 2006 -2010. (DalamRupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Usaha Daerah	Lain-Lain Pendapatan	Total PAD
2006	7.230.739.226	3.772.213.422	160.400.000	116.020.943	11.279.373.591
2007	7.442.522.480,90	4.083.063.987,17	67.600.000	219.815.583,44	11.813.002.051,14
2008	13.307.605.689,30	7.412.866.452,80	250.000.000	877.714.065,78	21.848.186.297,81
2009	18.686.070.727,69	8.814.868.421,50	625.000.000	1.735.943.022,11	29.861.882.302,30
2010	21.317.471.037,54	9.279.005.133	857.724.770,99	2.594.114.617,90	34.483.155.593,21

Sumber : Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan ,2011

Daerah dalam pembiayaan daerahnya tidak terlalu berharap sumber pembiayaannya dari (PAD) karena sumber pembiayaan dari sumber ini relative masih kecil. Meskipun demikian sumber ini masih diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 34 Tahun 2000, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan usaha yang diberikan oleh pemerintah, dan hasil pungutan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan untuk melihat sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Sumbangan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan Tahun. 2006 -2010 (dalam Rupiah)

Tahun	Retribusi Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)
2006	3.772.213.422	11.279.373.591
2007	4.083.063.987,17	11.813.002.051,14
2008	7.412.866.452,80	21.848.186.297,81
2009	8.814.868.421,50	29.861.882.302,30
2010	9.279.005.133	34.483.155.593,21

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan, 2011

Tabel 2 menunjukkan sumbangan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan dari tahun 2006 -2010, terlihat sumbangan retribusi daerah terus mengalami peningkatan penerimaannya setiap tahun.

Dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan sektor perhubungan dapat memberikan sumbangan terhadap PAD, sumbangan ini diperoleh dari 2 (dua) pos retribusi daerah, yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah dan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas pelayanan jasa usaha yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian barang daerah, dalam hal ini berupa pemberian perizinan tertentu.

Untuk pengelolaan penerimaan sektor perhubungan ini adalah menjadi kewenangan bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan, yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.

Untuk melaksanakan kegiatannya Dinas Perhubungan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), UPTD yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan antara lain :

1. UPTD Parkir
2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
3. UPTD Terminal
4. UPTD SIM dan STNK, BPKB dan PKB

UPTD yang di bentuk ini memiliki tugas untuk mengelola dan memelihara asset perhubungan yang ada di Kabupaten Way Kanan dan menarik pungutan pajak daerah

dan retribusi daerah yang merupakan sumber penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan dari sektor perhubungan

Sumbangan sektor perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan selama kurun waktu 2006 -2010 pada Tabel 3

Tabel 3. Sumbangan PAD Sektor Perhubungan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 -2010.(dalam Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perhubungan (Rp)	Sektor	Pendapatan asli Daerah (PAD) (Rp)
2006	1.884.482.790		11.279.373.591
2007	1.630.007.750		11.813.002.051,14
2008	2.633.677.450		21.848.186.297,81
2009	2.997.089.012		29.861.882.302,30
2010	3.525.586.549		34.483.155.593,21

Sumber : Dinas Pendapatandan Aset Daerah Ka. Way Kanan , 2011

Dari gambaran Tabel 3 dapat diketahui sumbangan sektor perhubungan yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan dengan adanya peningkatan setiap tahunnya terutama sejak tahun 2007 hingga tahun 2010. Namun hal ini telah ditingkatkan dengan berbagai upaya, tetapi masih belum optimalnya penarikan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipungut oleh dinas Perhubungan.Sumber penerimaan dari sektor perhungan meliputi:

1. Pajak parkir, (UPTD) Parkir.

Pemungutan Pajak parkir didasarkan pada Peraturan Daerah yang dituangkan dalam Perda No.012 Tahun 2005. dan efektif telah dijalankan sejak tahun 2007.

2. Retribusi Daerah

a. Retribusi parkir di tepi jalan umum, dikelola oleh UPTD Parkir

Tabel 4. Sumbangan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Terhadap

Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 -2010.

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2006	1.359.000.000	1.359.408.790
2	2007	1.210.000.000	1.214.153.250
3	2008	1.650.000.000	1.650.004.050
4	2009	1.650.000.000	1.650.027.250
5	2010	1.400.000.000	1.296.782.100

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2011.

b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, dikelola oleh UPTD Pengujian Kenderan Bermotor.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan berdasarkan Perda No.9 Tahun 2005 dan baru berjalan pada tahun anggaran 2006.

Tabel 5. Sumbangan Retribusi Pengujian Kenderan Bermotor Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 -2010 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2006	-	-
2	2007	-	-
3	2008	-	-
4	2009	115.000.000	160.145.712
5	2010	500.000.000	471.662.317.

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2011.

c. Retribusi Izin trayek, dikelola oleh UPTD Terminal

Izin trayek ini ditetapkan agar angkutan Yang terdaftar di Kabupaten Way

Kanan dapat terorganisir terutama angkutan luar kota antar desa.

Tabel 6. Sumbangan Retribusi Izin Trayek Angkutan Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 -2010 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2006	1427000.000	165.310.000
2	2007	128.000.000	129.833.000
3	2008	172.000.000	198.116.000
4	2009	219.000.000	232.080.000
5	2010	234.000.000	262.331.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2011.

d. Retribusi terminal, dikelola oleh UPTD Terminal

Retribusi terminal dipungut berdasarkan Perda No.11 Tahun 2006,

retribusi terminal ini berlaku untuk seluruh terminal wilayah Kabupaten

Way Kanan meliputi Baradatu, Banjit, Blambangan Umpu, Kasui, Way

Tuba.

Tabel 7. Sumbangan Retribusi Terminal Terhadap Penerimaan Sektor Perhubungan Kabupaten Way Kanan Tahun 2006-2010 (Dalam Rupiah)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2006	525.000.000	525.074.000
2	2007	492.187.500	415.918.500
3	2008	1.000.000.000	783.267.400
4	2009	1.000.000.000	940.213.400
5	2010	1.200.000.000	1.010.197.800

Sumber : Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2011

Penerimaan daerah dari sektor perhubungan ini belum tergali secara optimal sedangkan potensinya masih sangat memungkinkan untuk didapat. Tidak optimalnya penerimaan dari sektor Perhubungan dikarenakan masih banyaknya asset dinas perhubungan yang belum dikelola secara baik dan dikenakan atau ditarik pajak dan retribusinya, seperti belum adanya penetapan dari pemerintah Kabupaten Way Kanan tentang bagaimana system menegement pengelolaan keuangan daerah yang berbasis pada kinerja keuangan daerah.

1.2 Permasalahan

Pembiayaan pembangunan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyelenggarakan Pemerintahan otonomi, pemerintah Kabupaten Way Kanan sering mengalami kesulitan dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau belum seperti yang diharapkan. Pajak parkir dan retribusi dari sektor perhubungan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki arti penting di samping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya, untuk itu perlu ditingkatkan lagi penerimaannya.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

“ Bagaimanakah Penerimaan Sektor Perhubungan dalam mendorong Pendapatan

Daerah Kabupaten Way Kanan “

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya sumbangan setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang ada terhadap penerimaan sektor perhubungan yang dapat disumbangkan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan .
2. Untuk mengetahui rata-rata besarnya kontribusi PAD sektor perhubungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan.
3. untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan dari sektor perhubungan

1.4 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah yang telah berlangsung hingga saat ini merupakan bagian dari adanya reformasi atas kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah serta dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah potensi penerimaan yang digali di daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari perusahaan milik

daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu sektor yang memberikan masukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Way kanan adalah sektor perhubungan. Penerimaan sektor perhubungan termasuk dalam pos pajak daerah dan retribusi daerah, yang pengelolaannya dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Way kanan.

Penerimaan sektor Perhubungan kabupaten Way kanan yang disumbangkan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri : Pajak parkir dan retribusi parkir di tepi jalan umum, dikelola oleh UPTD Parkir, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, dikelola oleh UPTD Pengujian Kenderaan Bermotor Retribusi terminal dan izin trayek, dikelola oleh UPTD Terminal, Penerimaan dari UPTD SIM dan STNK, BPKB dan PKB Penerimaan dari UPTD Pelabuhan.

Dari total keseluruhan penerimaan sektor perhubungan akan dilihat kontribusi yang diberikan oleh sektor perhubungan terhadap pendapatan asli daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini akan dibagi menjadi lima Bab, yaitu :

- Bab I. Pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.
- Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisikan berbagai teori yang berkaitan dengan penulisan ini.
- Bab III. Metode Penelitian berisikan tentang bahan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini.
- Bab IV. Analisis dan Pembahasan
- Bab V. Simpulan dan Saran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (*Soenyono dalam Rizal Alfian Malarangeng dkk, 2001:107*).

Pemberian kewenangan otonomi daerah didasarkan pada azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi yang

luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan *otonomi yang bertanggung jawab* adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi disebut daerah otonom, sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi disebut wilayah administrasi.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang dipakai yaitu:

1. Digunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota.
3. Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa (*Rozali Abdullah, 2000:14*).

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi daerah urusan rumah tangganya. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya (*A.W. Widjaja, 1998:13*).

Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah propinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (*Deddy supriadi,2002:4*).

Dalam melaksanakan peranan dan fungsi pemerintahan serta kegiatan pembangunan, kebaikan-kebaikan desentralisasi yaitu :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat, meningkatkan pengertian rakyat dan akan berarti pula mendukung kegiatan pembangunan sosial ekonomi.
2. Dapat lebih realistis dalam menyusun program-program pembangunan daerah.
3. Memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk latihan mengurus rumah tangganya sendiri (*Ibnu Syamsi, 1986:24*).

2.2 Keuangan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sumber-sumber keuangan daerah, yang merupakan sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah daerah, yang berhubungan dengan tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Konsekuensi dari pemberian kewenangan atas otonomi daerah, maka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan :

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

daerah serta antara propinsi dan kabupaten/kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap sistem pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber keuangan daerah dapat berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Karena tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah dikelola tanpa membebani pemerintah pusat terutama yang merupakan komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut *Bintoro Tjokroamidjojo (1986:53)*, sumber-sumber keuangan daerah meliputi :

1. Dari pendapatan daerah melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. Penerimaan dari jasa pelayanan daerah, seperti tarif perizinan dan lain-lain.
3. Pendapatan daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yaitu perusahaan yang mendapatkan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
4. Penerimaan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang hal ini masing-masing daerah berbeda persentase penerimaannya.
5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk daerah tersebut, seperti pelaksanaan instruksi presiden.
6. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat yaitu yang bersifat khusus karena keadaan-keadaan tertentu.
7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup baik pula. Dalam hal ini daerah dapat memperoleh melalui beberapa cara yaitu :

1. Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah diestui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah.
4. Menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat (*Josef Riwu Kaho, 1991:125*).

2.3 Pengertian dan Peranan Pajak Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari pajak perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi-potensi pajak yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang harus diberikan oleh wajib pajak atas jasa atau pemberian izin oleh daerah.

Ciri-ciri mendasar dari pajak daerah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi
2. Objek pajak terletak pada daerah kabupaten/ kota
3. Objek pajak bukan merupakan objek pajak pusat ataupun provinsi
4. Tidak memberikan dampak negative terhadap ekonomi daerah kabupaten/kota

5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat (*Deddy Supriady, 2002:267*)

Secara umum pajak mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran (*budgetary*) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sedangkan pajak dalam fungsinya sebagai pengatur (*regulatory*) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi (*Suparmoko, 1986 : 91*).

2.4 Pengertian dan Peranan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil retribusi daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari retribusi perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi-potensi yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang harus diberikan oleh wajib pajak atas jasa atau pemberian izin oleh daerah, dan retribusi adalah pungutan daerah

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut *Josef Riwu Kaho (1991:117)*, dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh pemerintahan daerah.

Ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah :

1. Retribusi dipungut oleh negara.
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat.
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenakan jasa-jasa yang disiapkan negara (*Josef Riwu Kaho, 1991:152*).

Secara umum retribusi mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran (*budgetary*) retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Sedangkan retribusi dalam fungsinya sebagai pengatur

(*regulatory*) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi (*Suparmoko, 1986 : 96*).

2.5 Pengertian dan Peranan Dana Bagi Hasil dari Kabupaten Way Kanan Terhadap Penerimaan Daerah

Dana bagi hasil dari kabupaten Way kanan adalah dana yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten, yang dipungut dari pajak yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai apa saja yang menjadi hak kabupaten antara lain pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak bahan bakar bermotor, Pajak pemampatan air bawah tanah dan permukaan.

Peranan dari dana bagi hasil sangat berarti bagi Penerimaan Daerah walaupun tidak terlalu besar tetapi sangat membantu keuangan daerah di daerah kabupaten dan kota untuk digunakan dalam menambah jumlah Penerimaan Daerah kabupaten/kota yang berada di wilayah kabupaten tersebut.

2.6 Peran sektor Perhubungan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Way kanan.

Kota Way kanan sebagai salah satu kota di Lampung dan memiliki mobilisasi penduduk yang banyak. Dengan salah satu kota berjumlah penduduk banyak

perhubungan sangatlah dibutuhkan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Way Kanan melihat sektor perhubungan sangatlah potensial sebagai salah satu sektor yang memberikan pemasukan terhadap pendapatan asli daerah.

Sejak bergulirnya otonomi daerah dimana daerah dianjurkan untuk mengelola rumah tangganya masing-masing pemerintah berdasarkan keputusan Walikota Nomor : 12 Tahun 2001 membentuk dinas perhubungan guna mengelola perhubungan di kota Way kanan.

Pertumbuhan sektor perhubungan yang sangat pesat di Way kanan merupakan salah satu alasan mengapa sektor perhubungan begitu diperhatikan selain kabupaten Way kanan juga adalah sebagai salah satu kota yang dilintasi oleh jalan lintas Sumatra sebagai pintu gerbang Pulau Sumatra. Di kota Way kanan juga terdapat salah satu perlintasan antar lintas Sumatra.

Dengan potensi yang begitu besar yang dimiliki oleh sektor perhubungan di kota Way kanan maka sektor perhubungan juga memberikan kontribusi yang cukup berarti pula terhadap Penerimaan Daerah Kota Way kanan, yaitu dengan mengenakan pajak daerah dan retribusi di beberapa aspek perhubungan yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, selain pajak daerah dan retribusi Dinas perhubungan juga mengelola dana bagi hasil yang diterima dari kabupaten.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series), berupa data tahunan 2006 -2010. Runtun waktu penelitian ini diambil karena dalam kurun waktu 2006 -2010 banyak kebijakan-kebijakan yang diberlakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu pada periode ini banyak dilakukan perubahan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan dalam memberikan pelayanan public dan upaya menggali sumber penerimaan daerah dari sektor ini.

Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui dua pendekatan penelitian yaitu :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung ke Dinas Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan untuk mengumpulkan data Penerimaan Daerah, data dari laporan tahunan, statistika Perhubungan, untuk mengetahui potensi apa lagi yang belum digali dan kendala yang dihadapi dari sektor perhubungan.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.2 Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Alat analisis ini diharapkan mampu membantu analisis diskripsi dalam upaya menggambarkan keadaan dan kemampuan Dinas perhubungan dalam upaya memberikan perenannya dalam meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

1 Analisis Kualitatif

Yaitu menganalisis masalah dan mencari pemecahannya dengan menggunakan teori-teori pendukung yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2 Analisis Kuantitatif

Yaitu dengan menggunakan metode analisis proporsional dan pertumbuhan, untuk mengetahui besarnya proporsi dan perkembangan sumbangan sektor perhubungan setiap tahunnya terhadap keseluruhan Penerimaan Daerah (PD). Untuk menghitung total penerimaan sektor perhubungan yaitu dengan menggunakan metode perhitungan yang dibuat menjadi berikut:

$$TP = TP_1 + TP_2 + TP_3 + TP_4$$

Keterangan :

TP : Total Penerimaan Sektor Perhubungan

TP₁ : Penerimaan dari UPTD Parkir (Pajak Parkir + Retribusi Parkir)

TP₂ : Penerimaan dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (Retribusi uji kendaraan Bermotor)

TP₃ : Penerimaan dari UPTD Terminal (Retribusi Terminal + Retribusi Izin Trayek)

TP₄ : Penerimaan dari UPTD SIM dan STNK, PKB dan BBNKB

Untuk menghitung kontribusi dari sektor perhubungan terhadap Penerimaan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$K = \frac{TP}{PD} \times 100\%$$

Keterangan

K : Kontribusi

TP : Total Penerimaan Sektor Perhubungan

PD : Penerimaan Daerah

Untuk menghitung potensi sektor perhubungan yaitu dengan menggunakan metode perhitungan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan, meliputi :

1. Perda No.12 Tahun 2005, tentang Retribusi Parkir.

$$PD = \sum \overline{\text{Jumlah kendaraan yang parkir} \times \text{tarif} \times 365 \text{ hari}}$$

2. Perda No.9 Tahun 2005, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

per-Tahun

$$PD = \frac{\sum \text{Jumlah kendaraan Per Type Armada} \times \text{tarif}}{\quad}$$

3. Perda No.15 Tahun 2006, tentang Retribusi Izin Trayek per-Tahun.

$$PD = \frac{\sum \text{Jumlah kendaraan Per Jenis Angkutan} \times \text{tarif}}{\quad}$$

4. Perda No.17 Tahun 2006, tentang Retribusi Terminal per-Tahun

$$PD = \frac{\sum \text{Jumlah kendaraan Per Jenis Angkutan Yang masuk Terminal} \times \text{tarif}}{\quad}$$

$$PD = \frac{\sum \text{Jumlah Kios / Kamar mandi / Rumah Toko} \times \text{tarif}}{\quad}$$

$$PD = \sum \text{Jumlah Penumpang per-hari} \times \text{tarif}$$

3.3 Gambaran Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan berdasarkan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Way Kanan:

1. Tugas Pokok

- a. Sebagian kewenangan rumah tangga Pemerintah Kabupaten Way Kanan (otonom) dalam bidang perhubungan yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tugas desentralisasi dan tugas pembentukan yang diberikan oleh pemerintah kepada Bupati.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan penyusunan penetapan jaringan transportasi jalan kota
- b. Melaksanakan perencanaan dan penetapan lokasi terminal Bus dan terminal angkutan barang
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan perpajakan kendaraan bermotor serta penetapan izin pembangunan dan pengoperasian tempat parkir serta penetapan tarif parkir
- d. Melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor melalui penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor dan administrasi kendaraan bermotor.
- f. Penetapan jaringan trayek dan komposisi angkutan ekonomi dan non ekonomi serta memberi izin pengoperasian angkutan wilayah kota dan pedesaan
- g. Memberikan izin dan pengujian alat telekomunikasi dan pemasangan alat komunikasi,serta penarikan retribusi berupa pemasangan antena penerimaan siaran radio, televisi dan sambungan saluran telepon seluler
- h. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai pembantu dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, adapun UPTD yang ada di Dinas Perhubungan :
 - 1.UPTD Parkir
 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 3. UPTD Terminal
 4. UPTD SIM dan STNK,BBNKB dan PKB
 5. UPTD Pelabuhan

3. Organisasi di Dinas Perhubungan

Dalam menjalankan organisasi pemerintahan dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka disusun struktur organisasi di lingkup Dinas perhubungan sebagai berikut :

- a. kepala Dinas
- b. Wakil Kepala Dinas
- c. Bagian Tata Usaha
- d. Subdin Perhubungan Darat
- e. Subdin Perhubungan Laut
- f. Subdin Pos Dan Telekomunikasi
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari :
 - 1.UPTD Parkir
 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 3. UPTD Terminal
 4. UPTD SIM dan STNK, BBNKB dan PKB
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan susunan organisasi yang telah ditetapkan ini lah Dinas Perhubungan menjalankan wewenang sebagai pengelola seluruh aset perhubungan yang dimiliki oleh kabupaten Way kanan. Sebelum keluarnya peraturan ini Dinas Perhubungan sebelumnya bernama Dinas Lalulintas Angkutan Dan Jalan (DLLAJ).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerimaan dari sektor perhubungan dari seluruh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan setiap tahunnya cenderung meningkat, hanya pada tahun 2007 terjadi penurunan dari Rp. 1.884.482.790,00 pada tahun 2006 menjadi Rp. 1.640.007.750,00 pada tahun 2007. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2010 penerimaan dari sektor perhubungan terus meningkat, disebabkan Kabupaten Way Kanan telah menerima bagi hasil dari Provinsi yaitu dari PKB dan BBNKB.
2. Rata-rata Kontribusi yang di berikan oleh sektor perhubungan terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Way Kanan begitu kecil yaitu 2,53 %
3. Realisasi Penerimaan Daerah dari sektor perhubungan terhadap target rata-rata pencapaian realisasinya 91,14 % dimana penyimpangan realisasi terhadap target dengan rata-rata 8,86 %. Artinya Realisasi penerimaan Daerah masih pada batas toleransi.

5.2 Saran

1. Perlunya peninjauan Peraturan Daerah tentang sektor Perhubungan di Kabupaten Way Kanan , terutama tentang objek wajib Pajak dan wajib retribusi agar terlaksana dengan baik dan pencapaiannya yang optimal
- 2 Meningkatkan koordinasi antara Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dengan Satker Perhubungan di Kabupaten Way Kanan khususnya teknis dalam menghimpun data potensi yang ada, kegiatan monitoring, pengawasan dan evaluasi, sehingga pencapaian target Penerimaan Daerah dari sektor perhubungan dapat tercapai.
- 3 Perlunya ditingkatkan kemampuan pengelolaan manajemen dan koordinasi antar UPTD di Satker Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan untuk dapat menjangking retribusi dari hasil aset-aset perhubungan yang dikelola.
- 4 Perlunya ditingkatkan jumlah dan kemampuan personil maupun organisasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 5 Perlunya ditingkatkan frekuensi pengawasan terhadap penyelenggaraan pengawasan penarikan pajak dan retribusi dari sektor perhubungan dengan instansi lain seperti pihak kepolisian dan penerapan sanksi yang lebih tegas dan keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan yang ada di Kabupaten Way Kanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Devas, Nick. Brian Binder. Anne Booth. Kenneth Davey. Roy Kelly. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. UI-Press. Jakarta.
- Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan 2011. *Target dan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006-2010..*
- Dinas PerhubunganKabupaten Way Kanan. *Laporan Tahunan Satker Dinas PerhubunganKabupaten Way Kanan*.
- Harun Hamroeli, H., *Analisis Peningkatan PAD*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Malarangeng, Rizal Alfian dkk. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*. BIGRAF Publishing. Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Muchsin, Sandra Octatia. 2003. *Potensi Sumbangan Sektor Perkebunan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Propinsi Lampung*. Skripsi
- Riwu Kaho, Josef. 1991. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor yang mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Rajawali. Jakarta.
- Suparmoko. 1986. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1986. *Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Indonesia Dalam GBHN*. BPFE-UGM. Jakarta.
- Undang – undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Departemen Dalam Negeri RI.
- Universitas Lampung. 2000. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandarlampung.

Widjaja, A.W. 1998. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Way Kanan Dalam Angka. 2011 Kantor Statistik Kabupaten Way Kanan 2011